

## **POTRET MASYARAKAT MISKIN PENYANDANG DISABILITAS DI PONOROGO: Penyebab Dan Solusi Kebijakan Pemerintah**

### **PORTRAIT OF POOR COMMUNITIES WITH DISABILITIES IN PONOROGO: Causes And Solutions Of Government Policy**

**Intan Pradana<sup>1</sup>, Bambang Widiyahseno<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jalan Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Ponorogo,  
Kabupaten. Ponorogo, Jawa timur 63471

<sup>1</sup> [inc.prd2@gmail.com](mailto:inc.prd2@gmail.com) <sup>2</sup> [bbwidiyahseno@umpo.ac.id](mailto:bbwidiyahseno@umpo.ac.id),

Received: June 18, 2022

Revised : June 27, 2022

Accepted: June 28 ,2022

Available Online: July 01, 2022

**Corresponding author**

Bambang Widiyahseno

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

e-Mail: [bbwidiyahseno@umpo.ac.id](mailto:bbwidiyahseno@umpo.ac.id)

#### **Abstract**

*This research begins with a phenomenon that occurs in people with disabilities. As a result, organ function is not perfect. This limitation does not provide freedom for persons with disabilities to carry out daily activities. Therefore, people with disabilities need special attention in developing their independence so that they can carry out their social functions. The purpose of this study is to clarify the role of local governments in alleviating poverty problems for groups of people with disabilities. This research was conducted using a descriptive approach with a qualitative approach. The investigation comes from the description of the informants conducted through interviews, not numbers. Collecting data for this research through observation, interviews, and literature study. Data analysis for this study involves collecting all the data and reducing the data to draw conclusions as a result of the study. The results of the study show that the government is making efforts to empower people with disabilities which is supported by socialization and training, especially for people with disabilities. They are trained and empowered to be able to work. Such as, making lamps from recycled materials, crafting doormats from patchwork and cultivating catfish. Through empowerment activities, persons with disabilities earn daily income from doormat craft activities and monthly income from catfish farming. This program is an effort to improve the standard of living of persons with disabilities. With these skills, it is hoped that people with disabilities can save their families from poverty and be able to open access to social welfare.*

**Keyword :** *Poverty, Persons with disabilities, Government Policy, Empowerment*

#### **Abstrak**

Penelitian ini diawali dengan fenomena yang terjadi di masyarakat penyandang disabilitas. Akibatnya terjadinya fungsi organ yang tidak sempurna. Keterbatasan ini tidak memberikan kebebasan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus dalam mengembangkan kemandiriannya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas peran pemerintah daerah dalam mengentaskan masalah kemiskinan kelompok penyandang disabilitas. Pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penyelidikan berasal dari uraian narasumber yang dilakukan melalui wawancara, bukan angka. Pengumpulan data untuk penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data untuk penelitian ini melibatkan pengumpulan semua data dan reduksi data untuk menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang didukung dengan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan khususnya bagi penyandang disabilitas. Mereka dilatih dan diberdayakan agar bisa berkarya. Seperti, membuat lampu dari bahan daur ulang, kerajinan keset dari kain perca dan budidaya ikan lele. Melalui kegiatan pemberdayaan, penyandang disabilitas memperoleh

penghasilan harian dari kegiatan kerajinan keset dan penghasilan bulanan dari budidaya ikan lele. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas. Dengan keterampilan ini, diharapkan penyandang disabilitas bisa menyelamatkan keluarga mereka dari kemiskinan dan mampu membuka akses kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci :** Kemiskinan, Penyandang Disabilitas, Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan

## PENDAHULUAN

Pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan suatu kebijakan adalah negara. Kebijakan pemerintah yang seringkali bersinggungan langsung dan mempengaruhi kegiatan rakyat merupakan kebijakan pada bidang ekonomi.

Negara-negara di dunia mengalami salah satu tantangan tersulit, terutama di negara berkembang, yakni dalam hal pengentasan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan biasanya dilakukan dengan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Dengan perkiraan bahwa pertumbuhan produksi nasional atau *Gross National Product* (GNP) dapat memajukan kegiatan ekonomi lainnya, dengan harapan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak serta adanya peluang usaha (Susilawati, 2016).

Indonesia sebagai negara berkembang sedang berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan masyarakatnya. Salah satu langkah khusus adalah menerbitkan pedoman pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Hal ini tercantum dalam program pengentasan kemiskinan. Setelah menjabat, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Nawacita yang mencakup sembilan prioritas pembangunan bagi Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada

dua program Nawacita yang pro dengan pengentasan kemiskinan (Wedhaswary, 2014), yaitu: membangun Indonesia dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka satu negara. Mengembangkan kualitas hidup Indonesia melalui Program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun dan Program Indonesia Sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Serta mempromosikan lapangan kerja Indonesia dan program kepemilikan lahan seluas 9 juta hektar.

Seharusnya permasalahan terkait dengan kemiskinan tidak hanya dideskripsikan dari sudut pandang ekonomi saja, melainkan aspek sosial juga misalnya masyarakat dengan kondisi keterbelakangan mental atau biasa disebut dengan penyandang disabilitas tunagrahita. Jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia hingga saat ini diprediksi telah mencapai 16.5 juta jiwa. Namun sangat disayangkan, dalam pemenuhan haknya masih banyak dijumpai adanya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Keberadaan negara masih dirasa kurang dalam memberikan jaminan dan proteksi untuk masyarakat dengan kondisi keterbelakangan mental.

Faktanya, penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) yang hingga saat ini seringkali mengalami diskriminasi, ketidakadilan, dan keterlantaran. Keadaan demikianlah yang memaksa mereka sebagai seseorang yang

kurang atau tidak berdaya dalam melakukan kegiatan kehidupan sosial sebagai akibatnya menghadapi kendala dalam memperjuangkan keberfungsian sosial. Keadaan para penyandang disabilitas terbilang cukup memprihatinkan, diketahui bahwasanya secara umum masih berada pada keluarga miskin yangmana belum cukup terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disabilitas atau kecacatan sebagai dua perkara yang sulit dipisahkan, misalnya ibu dari keluarga yang tidak/kurang mampu, contohnya pada beberapa perkara tidak tercapuhinya kebutuhan gizi selama hamil, dan pasca melahirkan-pun sering dijumpai bahwasanya anak juga mengalami malnutrisi yang berakibat pada anak jadi kekurangan gizi bahkan mengalami kecacatan (Cahyono, 2017).

Kurangnya wawasan dan kesadaran keluarga tentang perkembangan anak yang mengalami kecacatan tak jarang terlambat diketahui yang berakibat pada penanganan yang tidak dilakukan sejak dini. Dengan begitu kemiskinan dapat didefinisikan sebagai salah satu aspek yang menyebabkan disabilitas atau kecacatan. Kemiskinan mengakibatkan penyandang disabilitas menghadapi banyak hambatan, keterbatasan dalam berbagai bentuk sebagai akibatnya sulit mengakses pendidikan yang memadai dan pekerjaan yang layak.

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang normal pada umumnya. Selaku bagian dari rakyat Indonesia, sudah sewajarnya para penyandang disabilitas menerima perlakuan yang eksklusif, yang bertujuan menjadi cara untuk proteksi diri dari kerentanan terhadap banyak sekali perlakuan diskriminasi dan terlebih proteksi dari beragam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Ndaumanu, 2020).

Kabupaten Ponorogo yang berada di Provinsi Jawa timur, Indonesia adalah kabupaten yang terkenal dengan keseniannya yang unik yaitu Reyog. Reyog telah menjadi sorotan publik bahkan hingga manca negara, terlebih setelah insiden dengan pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu. Ponorogo dikenal juga sebagai kota santri, memiliki banyak pesantren, termasuk pesantren ternama internasional seperti Pondok Pesantren Modern Gontor dan Pondok Pesantren Walisongo Ngabar, dan banyaknya figur nasional dan internasional yang telah dilahirkan dari Pesantren tersebut. Di antara sekian banyak modal budaya dan sosial yang terkenal secara nasional dan internasional tersebut di atas, telah diketahui bahwa ada fenomena mencengangkan dan unik yang dimiliki Ponorogo, yang jarang dijumpai di desa-desa lain yang ada di Indonesia. Ada empat desa yang dijuluki sebagai “Kampung Idiot”, yaitu Desa Krebet dan Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon, serta Desa Karangpatihan dan Desa Pandak di Kecamatan Balong.

Penyandang disabilitas di dua kecamatan tersebut, sebagian besar bermukim di kawasan perbukitan seperti Desa Krebet, Desa Sidoharjo, Desa Karangpatihan dan Desa Pandak. Kondisi geografis tiap desa sama. Artinya, sulit terjangkau, di lereng gunung, sulitnya menanam di area tanah berkapur, daerah terpencil dan akses transportasi terbilang cukup sulit. Penduduk bekerja sebagai petani atau pekerja bangunan. Akses pendatang ke daerah ini sangat sulit. Akan tetapi terdapat satu jalan utama yang melewati persawahan dan jenggala. Di pintu masuk desa, jalannya sempit. Jalan pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis. Aspal, kerikil, tanah. Ada berbagai lereng dan lereng khas daerah pegunungan.

Sehingga kendaraan roda dua yang dinilai mampu untuk menaklukkan jalan. Namun yang pasti saat hujan semua kendaraan lumpuh dikarenakan akses jalan yang mengarah ke pegunungan masih berupa lempung.

Ada banyak penyandang disabilitas yang dapat dijumpai di daerah tersebut. Akan tetapi, pola hubungan mereka tidak jauh berbeda dengan aktivitas manusia normal pada umumnya (Hanif & Asri, 2016). Penyandang disabilitas yang dapat bekerja diinstruksikan untuk membantu orang tuanya. Mereka yang tidak dibimbing diberikan kebebasan keluyuran di sekitar desa. Tak satu pun dari mereka yang mengganggu atau bahkan membuat kegaduhan, sehingga warga tidak peduli. Tidak ada yang dapat diagungkan dari segi perekonomiannya. Sebagai buruh tani penghasilan mereka hanya berkisar Rp100.000 hingga Rp300.000 per bulan. Hal ini berakibat pada penduduk yang tidak cukup mengkonsumsi makanan bergizi karena mereka berpenghasilan rendah dan keluarga mereka rata-rata memiliki dua anak atau lebih (Rulianiningsih & Suyanto, 2018).

Kondisi ini telah ada selama beberapa dekade. Jumlahnya sangat banyak dan adanya hubungan darah antar penyandang disabilitas, itu sebabnya banyak yang menyebutnya sebagai "Kampung Idiot". Ada orang idiot di mana-mana. Selain kondisi ekonomi yang kurang baik, kasus penyandang disabilitas intelektual juga disebabkan oleh kurangnya asupan makanan. Bahkan beberapa media telah menyatakan bahwa perkawinan sedarah juga menjadi penyebab insiden tersebut (Susilawati, 2016).

Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo dengan

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka baik secara finansial maupun non finansial. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin penyandang disabilitas berarti meningkatkan bakat berupa peningkatan potensi diri (*life skill*). Bentuk peningkatan *life skill* ini dapat berupa pemberian pelatihan kerja, kursus dan sebagainya. Dengan ini diharapkan kebutuhan dasar para penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Kementerian Sosial, pemerintah daerah dan lembaga sosial (pihak yang berkepentingan) dalam melaksanakan tindakan pengentasan kemiskinan bagi penyandang disabilitas dan mewujudkan persamaan hak dan peluang untuk kehidupan yang lebih mapan tanpa adanya perbedaan. Serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran, perhatian dan keterlibatan kerabat dan warga sekitar bagi penyandang disabilitas.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Kemiskinan**

Menurut Friedmann (1997) dalam (Pambudi et al, 2017) menjabarkan bahwa, kemiskinan adalah ketimpangan harapan untuk membangun pondasi kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial mencakup modal atau aset produktif (tanah, bangunan, peralatan, kesehatan, dll.), pendapatan dan pinjaman yang mencukupi bisa dijadikan sumber keuangan, menggunakan organisasi sosial dan politik untuk memperoleh kepentingan bersama (parpol, koperasi, dll), jaringan sosial atau jaringan untuk memperoleh pekerjaan, barang, dll., pengetahuan dan keterampilan yang tepat, informasi yang

berguna untuk kemajuan hidup dapat diperoleh dari jaringan sosial atau *network*. Adapun teori lain tentang kemiskinan disampaikan oleh Meier dan Baldwin, dalam (Saragih, 2015) yang mengatakan bahwasanya dibutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan (*skill*) yang mumpuni untuk mengelola dan melakukan beragam jenis kegiatan ekonomi yang berguna untuk meningkatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA).

Di negara berkembang, SDA yang melimpah tidak sepenuhnya dibudidayakan dan dikembangkan secara maksimal. Jenjang pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah mengakibatkan kurangnya tenaga profesional yang berkualitas dalam mengelola sumber daya alam dan terbatasnya yang pergerakan sumber daya termasuk modal yang terbatas (Sukirno, 1985).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan atau mengukur kemiskinan itu sendiri maka BPS memakai konsep kapasitas dalam memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs approach*). *Worldbank* menerbitkan *Handbook on Poverty and Inequality* yang mana telah dijadikan acuan dalam konsep ini. Dengan perencanaan ini, kemiskinan secara ekonomi dianggap tidak mempunyai untuk memenuhi kebutuhan pokok dan non-pangan jika diukur dari sisi pengeluaran. Jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapita berada di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut masuk dalam golongan masyarakat miskin.

### **Penyandang Disabilitas**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan keadaan seseorang dengan kondisi cacat mental dan fisik yang berakibat pada terhambatnya atau dibatasinya seseorang untuk bisa

berekplorasi. Namun, disabilitas juga merupakan istilah serapan bahasa Inggris, *disability*, yang artinya seseorang tidak bisa berbuat banyak dengan cara biasa.

Diketahui dari sumber lain yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik, psikis, intelektual atau panca indra pada jangka panjang yang pada hubungan sosialnya menjumpai kendala untuk bisa berkontribusi penuh dan efektif menurut kecenderungan hak. Sedangkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 mengenai Penyandang Cacat pada pokok-pokok kesepakatan poin 1 (pertama) menaruh penafsiran bahwasanya disabilitas ditujukan pada seseorang yang mempunyai mengalami gangguan mental maupun fisik yang bisa mengganggu atau menghalangi dirinya untuk bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, yang terdiri menurut, penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas mental; penyandang disabilitas fisik dan mental (PSIBK, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini yangman bermaksud untuk menjelaskan atau menjabarkan objek dan persoalan penelitian sedetail mungkin berdasarkan data dan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan maksud penggunaan studi kasus untuk mendapatkan data tentang isu-isu yang sesuai dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa timur khususnya di Kantor Dinas Sosial P3A Ponorogo yang beralamat di jl. Gondo suli No.35 Kabupaten Ponorogo, Jawa timur.

Informan adalah orang yang benar-benar memahami dan paham akan persoalan yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *interview*, mengamati, dan menelaah dokumen. Teknik analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dari narasumber.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *face to face interview* secara intensif dengan informan dan pengamatan langsung di lapangan. Analisis data yang digunakan dilakukan melalui pendekatan kualitatif melalui proses penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan menemukan fenomena sosial dan selanjutnya menjelaskannya secara komprehensif dan kompleks, terperinci menurut perspektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan-permasalahan yang dialami para penyandang disabilitas dapat menyita perhatian pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah memunculkan kebijakan baru bagi para penyandang disabilitas dengan tujuan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Adapun hak-hak para penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi sulit atau terbatas. UU No.8 Tahun 2016 meliputi 22 hak penyandang disabilitas, diantaranya : a. hak untuk hidup; b. hak terbebas dari stigma negatif; c. hak atas privasi; d. hak atas keadilan dan perlindungan hukum; e. hak mendapat pendidikan yang layak; f. hak berwirausaha dan kerjasama; g. kesehatan;

h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. budaya dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. aksesibilitas; n. pelayanan publik; o. perlindungan dari bencana; p.abilitas dan rehabilitasi; q. konsesi; r. pendataan; s. hidup mandiri dan diikutsertakan dalam masyarakat; t. berkomunikasi serta berinteraksi dan mendapatkan informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. terbebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, eksploitasi

Disamping itu adanya upaya dalam pengentasan kemiskinan salah satunya dengan cara memberdayakan para penyandang disabilitas sebagai solusi agar mereka mampu mengasah potensi yang mereka miliki sehingga mampu menghasilkan sebuah karya yang mana dapat mensejahterakan kehidupan mereka baik secara finansial maupun non finansial.

Berdasarkan hasil wawancara telah dijelaskan bahwa para penyandang disabilitas dengan segala keterbatasannya tidak bisa bekerja seperti manusia normal yang lain, sehingga kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari mengakibatkan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti mandi, makan, mencuci, berganti pakaian tidak dapat dilakukan secara mandiri, lantas hal tersebut membuat mereka memerlukan bantuan orang lain.

Oleh karena itu Dinas Sosial P3A Ponorogo memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki anggota anggota keluarga penyandang disabilitas agar mereka mau menerima serta tidak memandang sebelah mata. Disamping itu, diberikannya pendamping untuk mereka para disabilitas di Dinas Sosial P3A Ponorogo yangmana para pendamping bertugas untuk menghimpun data, memantau perkembangan dari para penyandang disabilitas itu sendiri.

Salah satu kegunaan untuk menghimpun data itu sendiri adalah karena dari pemerintah ada beberapa bantuan sosial yang diberikan langsung oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, yang mana bantuan tersebut diberikan secara berkala. Dengan cacatan orang-orang yang mendapat bantuan wajib terdaftar ke Data Terpadu Kesertaan Sosial (DTKS). Bantuan yang diberikan bisa berupa barang seperti paket sembako atau berupa uang yang ditransfer ke rekening si penerima yang mana hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan pantauan para pendamping. (Nurhayati, 2022)

Tanggungjawab besar dimiliki oleh pemerintah desa dalam upaya menyelesaikan masalah yang ada di desa. Pemerintah desa sepenuhnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan hak para penyandang disabilitas tunagrahita seperti halnya yang ada di Desa Karangpatihan, Balong dan Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Jambon. Permasalahan yang dialami para penyandang disabilitas tersebut terbilang sangat berkesinambungan, dari permasalahan pendidikan hingga lapangan kerja. Pemerintah desa berperan aktif dalam menghadapi masalah tersebut, dengan menanamkan sifat kemandirian kepada masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental, dengan tujuan agar masyarakat lainnya tidak memandang sebelah mata kepada para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, pemerintah desa merespon dengan memberikan pendidikan masyarakat yang memberdayakan mereka untuk mencapai tujuan hidup mereka (Mahardhani, 2018).

## **Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas**

Di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan. Hal ini juga terjadi pada para penyandang disabilitas. Meskipun mereka dinilai memiliki keterbatasan justru dibalik keterbatasannya mereka memiliki *skill* yang luar biasa. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Jambon. Para penyandang disabilitas ditampung di Rumah Kasih Sayang.

Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi para penyandang disabilitas keterbelakangan mental untuk menerima makanan, tetapi juga melatih dan memberdayakan untuk bisa berkarya. Pelaksanaan programnya pun dilatarbelakangi dengan adanya kerjasama dengan “Kartini” Temanggung dari Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BRSBG) sebagai pelaksana teknis di lapangan (Jatim, 2011).

Rumah Kasih Sayang menjadi wadah untuk mereka dibina dan diberikan pelatihan ketrampilan seperti membuat kerajinan dari kain perca, ada yang bisa membuat lampu dari bahan daur ulang dan sampai dengan detik ini ternyata mereka mampu menjual produk-produk mereka secara *online*, tentu dibantu oleh pendamping. Jadi, dibalik kekurangan mereka juga bisa hidup selayaknya orang normal pada umumnya.

Tak hanya di Jambon saja, desa Karangpatihan kecamatan Balong juga melakukan hal yang sama. Menyadari kondisi ini meningkatkan kesadaran di kalangan karang taruna dan menciptakan kegiatan pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian penyandang disabilitas, mempengaruhi pola gaya hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Pemberdayaan merupakan rangkaian proses untuk menghilangkan ketidakberdayaan

kelompok minoritas. Menggunakan pemberdayaan sebagai upaya untuk mengurangi ketidakberdayaan penyandang disabilitas di desa Karangpatihan adalah tujuan yang tepat. Kegiatan yang dipilih untuk program pemberdayaan ini adalah budidaya ikan lele dan pembuatan keset (Cahyono, 2017). Pemilihan kegiatan pemberdayaan dalam budidaya ikan lele dan pembuatan keset didasarkan pada tiga hal. Pertama, sebagian besar bantuan pada saat itu bersifat konsumtif, membentuk kebiasaan mengandalkan donasi untuk kehidupan penyandang disabilitas. Kedua, pemilihan ikan lele biasanya mudah, dengan masa panen yang singkat yaitu 2,5 hingga 3 bulan. Ketiga, pelatihan membuat alas lantai untuk mendidik penyandang disabilitas untuk lebih produktif dan terampil. Dalam satu hari setiap warga penyandang disabilitas bisa membuat satu atau dua keset dengan harga Rp 15.000 per satuannya. Dari harga eceran Rp 15.000, Rp 7.500 dialokasikan untuk biaya produksi dan Rp 7.500 dialokasikan untuk upah produsen (Taqwarahmah, Riyono, & Setyawati, 2017).

Kehadiran penyandang disabilitas harus menjadi perhatian khusus pemerintah, khususnya pemerintah desa dan masyarakat, agar potensi keberadaan penyandang disabilitas dapat dikembangkan secara maksimal. Dorongan dari kelompok pemuda yakni Karang Taruna yang mewakili anak muda di desa Karangpatihan mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat desa Karangpatihan untuk ikut serta membantu para penyandang disabilitas.

Kehadiran penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai beban sosial dan finansial untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Lantas stigma negatif mendeskripsikan penyandang disabilitas

sebagai aib. Oleh karena itu, pemberdayaan disini didefinisikan untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang dapat berperan dalam lingkungan sebagai masyarakat yang lain. Upaya mengubah stigma sosial yang dihadapi masyarakat disabilitas sebagai beban saja dapat memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perubahan diri dan lingkungan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diberdayakan dengan munculnya kemandirian penyandang disabilitas. Dalam hal ini, mandiri bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan. Kemandirian disini diartikan sebagai kemandirian dalam kegiatan penyandang disabilitas. Keinginan untuk mengubah keadaan dan keinginan untuk bertindak akan melakukan kegiatan yang dapat menciptakan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Melalui kegiatan pemberdayaan, penyandang disabilitas memperoleh penghasilan harian dari kegiatan kerajinan keset dan penghasilan bulanan dari budidaya ikan lele. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas. Dengan keterampilan ini, diharapkan penyandang disabilitas bisa menyelamatkan keluarga mereka dari kemiskinan dan mampu membuka akses kesejahteraan sosial.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat dengan kondisi keterbelakangan mental rata-rata berasal dari keluarga miskin dengan penghasilan rerata di bawah upah minimum kota (UMK). Pemberdayaan kelompok rentan



ini harus terus dilaksanakan agar penyandang disabilitas khususnya keluarga miskin dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan bagi mereka yang terkena disabilitas intelektual dan disabilitas lainnya. Adanya bimbingan dan *support* dari pemerintah daerah dan instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Pemberdayaan ini ditujukan kepada golongan masyarakat rentan, yaitu penyandang disabilitas yang kurang mampu secara finansial maupun non finansial, agar dapat mandiri tanpa membebani orang lain. Program pemberdayaan masyarakat tersebut diberlakukan untuk para penyandang disabilitas usia kerja dengan kategori disabilitas ringan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, S. A. (2017). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 240.
- Cahyono, S. A. (2017, Desember). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 241-246.
- Hanif, M., & Asri, D. N. (2016). Perilaku dan Interaksi Sosial Warga Kampung Idiot Desa Sidoharjo dan Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo (Studi Fenomenologi Masyarakat Retardasi Mental). *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 12-20.
- Jatim, K. (2011, Juli 11). *Mensos Launching Program Rumah Kasih Sayang di Ponorogo*. Retrieved from Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur:  
<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/27604>
- Mahardhani, A. J. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal Berkarakter Cinta Tanah Air. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Ndaumanu, F. (2020, April 01). Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 132.
- Nurhayati, D. (2022, Juni 3). Penyandang Disabilitas. (I. Pradana, Interviewer) Ponorogo, Jawa timur, Indonesia.
- Pambudi et al, F. B. (2017). Perancangan Sistem Informasi Monitoring Bantuan Kemiskinan Ekonomi. *Skripsi*.
- PSIBK. (2018, September). *Pusat Studi Individu Berkebutuhan Khusus*. Retrieved from PSIBK:  
<https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/09/16/cacat-atau-disabilitas/#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20individu%20berkebutuhan%20khusus,kemampuan%20mental%20dan%20fisik%20seseorang>.
- Rulianiningsih, S., & Suyanto, T. (2018). Strategi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Tunagrahita Untuk Membangun Good Citizenship di Kampung Idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1047-1050.
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengantasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal DPR RI*, 51.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar*

*Kebijakan*. Jakarta: Lembaga  
Penerbit FE-UI.

Susilawati, I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif "Limbah Singkong" di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Lentera*, 224.

Taqwarahmah, C. G., Riyono, B., & Setyawati, D. (2017). Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 38-43.

Wedhaswary, I. D. (2014, May 21). *Kompas News*. Retrieved from Kompas.com:  
<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

Wikipedia. (2021, July 10). *Kemiskinan*. Retrieved from Wikipedia.org:  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>